

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

**Soekanto** Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Soekanto** Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

**Sutrisna** Hadi, 1989, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

**Budiardjo** Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dian Rakyat, Jakarta.

**Amiruddin** dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

**Muhammad** Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan 1*, Bandung Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Departemen** Luar Negeri Republik Indonesia, 2005, *Terjemahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

**Mertokusumo** Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

**Marzuki** Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### B. Artikel/Jurnal/Penulisan Hukum

**Amanwinata** Rukmana, 2000, Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7: Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia, Jakarta.

**Khairunnisa**, 2008, Tesis: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12

Tahun di Kabupaten Kolaka, Universitas Muhammadiyah Malang,  
Malang.

**Safira** Levana, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, dan Deviana

Yuanitasari, 2019, Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjajaran:  
Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik  
Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Bandung.

**Hasanah** Yenny Merinatul dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2017, Jurnal

Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Universitas Negeri  
Yogyakarta: Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah  
Daerah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

### C. Internet

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

<https://www.icj-cij.org/en/statute>.

<https://dapo.kemdikbud.go.id/>.

[https://www.michigan.gov/documents/mde/compulsory\\_attendance\\_257944\\_7.pdf](https://www.michigan.gov/documents/mde/compulsory_attendance_257944_7.pdf).

<https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance>.

<https://news.detik.com/berita/d-5620996/kpai-acungi-jempol-ppdb-dki-libatkan-sma-swasta-untuk-sekolah-gratis>.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia->

2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun->

ajaran-20202021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan

Pengadjaran (sudah dicabut).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(sudah dicabut).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Dasar (sudah dicabut).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016  
tentang Komite Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021  
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,  
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  
dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem  
Pendidikan.

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang  
Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun  
2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera  
Selatan.

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3  
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi  
Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian  
Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik  
Baru di Sekolah/Madrasah Swasta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk  
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 541

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Bersama Tahun Pelajaran 2021/2022.

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor-158/PID.SUS/2014/PN.SOE.